

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2023

VOLUME 3, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2023 VOLUME 3, 2023

<https://inhukab.bps.go.id>



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2023

VOLUME 3, 2023

Katalog 4601001.1402

ISBN -

Nomor Publikasi 14020.2329

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 36 halaman

Penyusun Naskah : Badan Pusat Statistik Kab Indragiri Hulu

Penyunting : Badan Pusat Statistik Kab Indragiri Hulu

Pembuat Kover oleh : Badan Pusat Statistik Kab Indragiri Hulu

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Kab Indragiri Hulu

Sumber ilustrasi www.canva.com

“Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Kabupaten Indragiri Hulu”

TIM PENYUSUN
STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN 2023
VOLUME 3, 2023

PENANGGUNG JAWAB

GUSWANDI, SST.

PENYUNTING

MUJAHID RASYID, S.Si, M.I.Kom.

PENULIS

AINUL ZITA FARRAH FAUZIA, S.Tr.Stat.

PENGOLAH DATA

AINUL ZITA FARRAH FAUZIA, S.Tr.Stat.

PEMBUAT INFOGRAFIS

AINUL ZITA FARRAH FAUZIA, S.Tr.Stat.

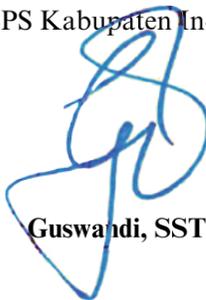
Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas kehendak-Nya Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2023 dapat diselesaikan. Statistik Politik dan Keamanan merupakan publikasi dari Fungsi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik. Publikasi ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi politik dan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2023, mengulas mengenai keadaan politik pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mulai dari jumlah anggota DPRD, peraturan daerah yang dihasilkan DPRD, hingga jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian juga membahas mengenai keamanan Kabupaten Indragiri Hulu, mulai dari kantor dan personil polisi hingga jumlah kejadian kejahatan menurut kelompok kejahatan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2020-2022.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang.

Rengat, Desember 2023
Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu



Guswandi, SST

DAFTAR ISI
STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN 2023
VOLUME 3, 2023

	Hal
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 TUJUAN PENULISAN.....	4
1.3 RUANG LINGKUP	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. METODOLOGI	7
2.1 SUMBER DATA	9
2.2 PENGUMPULAN DATA	9
2.3 KONSEP DEFINISI	10
2.3.1 KONSEP DALAM STATISTIK POLITIK	10
2.3.2 KONSEP DALAM STATISTIK KEAMANAN	10
2.4 PENJELASAN TEKNIS	11
BAB III. POLITIK	13
3.1 KONDISI PENDUDUK	15
3.2 LEMBAGA DEMOKRASI	16
3.3.1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	17
3.3.2 ORGANISASI MASYARAKAT/LSM	19
BAB IV. KEAMANAN	21
4.1 SARANA DAN PRASARANAN KEAMANAN WILAYAH ...	23
4.2 INDIKATOR UTAMA KEJAHATAN	25
4.3 TINDAK KEJAHATAN MENURUT JENISNYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	27
4.4 KORBAN KEJAHATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	28

DAFTAR ISI

	Hal
BAB V. PENUTUP	31
5.1 KESIMPULAN	33
LAMPIRAN	35

<https://inhukab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022	15
Gambar 2. Persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Menurut Jenis Kelamin.....	17
Gambar 3. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2022	18
Gambar 4. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022	19
Gambar 5. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022	20
Gambar 6. Jumlah Personel Polisi Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022	23
Gambar 7. Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022	24
Gambar 8. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) dan Kejahatan Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022	26
Gambar 9. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Jumlah Kejadian Kejahatan (Lapor dan Selesai) Menurut Tahun 2020-2022	35
Lampiran 2. Jumlah Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Kejahatan Tahun 2020-2022	36

<https://inhukab.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN



<https://inhukab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling memengaruhi. Ada kalanya situasi politik di suatu wilayah akan memengaruhi keamanan di wilayah tersebut, atau sebaliknya situasi keamanan di suatu wilayah akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan-kebijakan politik di wilayah tersebut.

Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Rasa aman (security) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain itu, hal ini juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman bagi warganya.

Di sisi lain, seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Dimulainya era

reformasi di Indonesia, memberi peluang pada penduduk Indonesia untuk lebih mudah dalam hal kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berpengaruh, baik langsung maupun tidak terhadap tingkat stabilitas keamanan dalam masyarakat. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Terkait hal tersebut, maka monitoring situasi politik dan keamanan di daerah menjadi perlu untuk mengetahui tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu berupaya melakukan penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2023. Diharapkan, publikasi ini mampu menjadi salah satu sumber informasi mengenai gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data statistik di bidang politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai situasi politik dan keamanan terkini di Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, tersedianya data statistik mengenai politik dan keamanan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3 RUANG LINGKUP

Publikasi ini menyajikan data tentang gambaran politik dan kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari publikasi ini terdiri dari lima bab meliputi pendahuluan, metodologi, politik, keamanan, dan penutup.

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.

Bab II Metodologi

Berisi tentang sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta konsep definisi yang digunakan.

Bab III Politik

Menjelaskan tentang kondisi politik di Kabupaten Indragiri Hulu.

Bab IV Keamanan

Menjelaskan tentang kondisi keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Bab V Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang dibuat berdasarkan pembahasan pada politik dan keamanan

2

METODOLOGI



BAB II

METODOLOGI

2.1 SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2023 ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2023 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu. Rincian data dan sumber publikasi data yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Publikasi Kabupaten Indragiri Hulu dalam angka 2023 untuk mendapatkan data jumlah proyeksi penduduk Tahun 2022.
2. Survei Statistik Politik dan Keamanan 2023 oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendapatkan data jumlah anggota DPRD menurut asal partai dan jenis kelamin Tahun 2022, jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD Tahun 2022, jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas)/lembaga swadaya masyarakat (LSM) Tahun 2022, jumlah kantor polisi, jumlah personil polisi, jumlah kejahatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022. Narasumber Survei Statistik Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi yang berkaitan dengan politik dan keamanan, antara lain Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Indragiri Hulu.

2.2 PENGUMPULAN DATA

Survei Statistik Politik dan Keamanan 2023 oleh BPS Kabupaten Indragiri Hulu menjadi salah satu sumber data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2023. Data pada survei Statistik Politik dan Keamanan 2023 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari registrasi/catatan instansi terkait. Selanjutnya data yang masuk ke BPS Kabupaten Indragiri Hulu

diolah menjadi tabel dan grafik yang tersaji dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Indragiri Hulu 2023.

2.3 KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

2.3.1 Konsep dalam Statistik Politik

- a. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.
- c. Organisasi Masyarakat/LSM adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya.

2.3.2 Konsep dalam Statistik Keamanan

- a. Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup

- c. Peristiwa yang diselesaikan oleh Kepolisian adalah :
- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau lebih diserahkan kepada jaksa
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa
- d. Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
- e. Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan

2.4 PENJELASAN TEKNIS

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini diantaranya:

- a. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)

$$crime\ rate = \frac{Jumlah\ kejahatan\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ penduduk} \times 100.000$$

Interpretasi : Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah

- b. Persentase penyelesaian peristiwa kejahatan (*crime clearance*)

$$crime\ clearance = \frac{Jumlah\ peristiwa\ kejahatan\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ peristiwa\ kejahatan\ yang\ dialporkan} \times 100.000$$

Interpretasi : Semakin tinggi berarti kinerja polisi semakin baik dalam menangani kasus

<https://inhukab.bps.go.id>

3

POLITIK

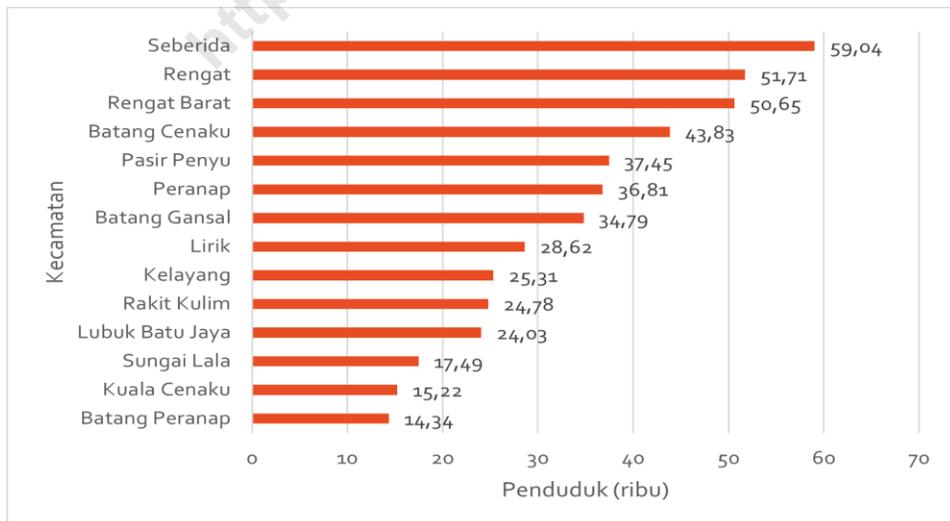


BAB III POLITIK

3.1 KONDISI PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi berniat untuk menetap. Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tersebar ke seluruh wilayah Indragiri Hulu yang memiliki luas mencapai 8,198.71 km², terbagi ke dalam 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari 178 desa dan 16 kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan mencapai 444.548 jiwa pada Tahun 2020 dan meningkat menjadi 464.076 jiwa pada Tahun 2022. Dengan luas wilayah Indragiri Hulu sekitar 8.198,71 km², dapat diartikan setiap 1 km² ditempati sekitar 55 jiwa penduduk pada Tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu per Tahun 2022 adalah sebesar 2,17 persen per tahun.



Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka, 2023

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi di Kecamatan Seberida, sedangkan Kecamatan Batang Peranap menjadi kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam kegiatan politik, jumlah penduduk merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara. Dengan mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya untuk memenangkan suatu pemilu karena rakyat adalah pemegang kedaulatan secara penuh.

3.2 LEMBAGA DEMOKRASI

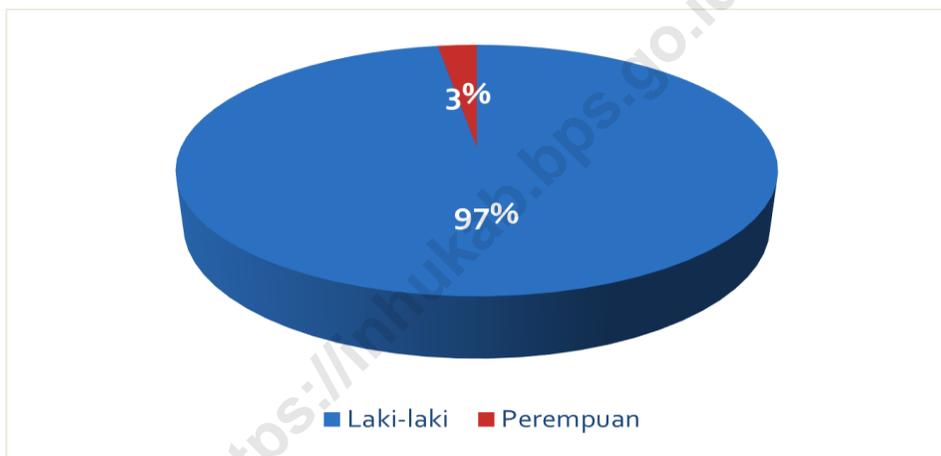
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini: adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk (1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi, (2) berekspresi atau berpendapat, (3) menjadi pejabat publik, (4) melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, (5) memberikan suara dalam pemilihan umum, (6) ada pemilihan umum yang jujur, (7) adanya sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan (8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl 1971: 3).

Berdasarkan konsepsi tersebut dibutuhkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai perantara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga formal yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Masyarakat akan menyampaikan aspirasi mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-

kelompok yang mereka bentuk bersama. Kelompok atau lembaga tersebutlah yang akan berperan dalam menjembatani kepentingan warga tersebut.

3.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 memiliki 40 anggota, yang terdiri dari 39 laki-laki dan 1 perempuan. Gambar 2 menunjukkan persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 menurut jenis kelamin.

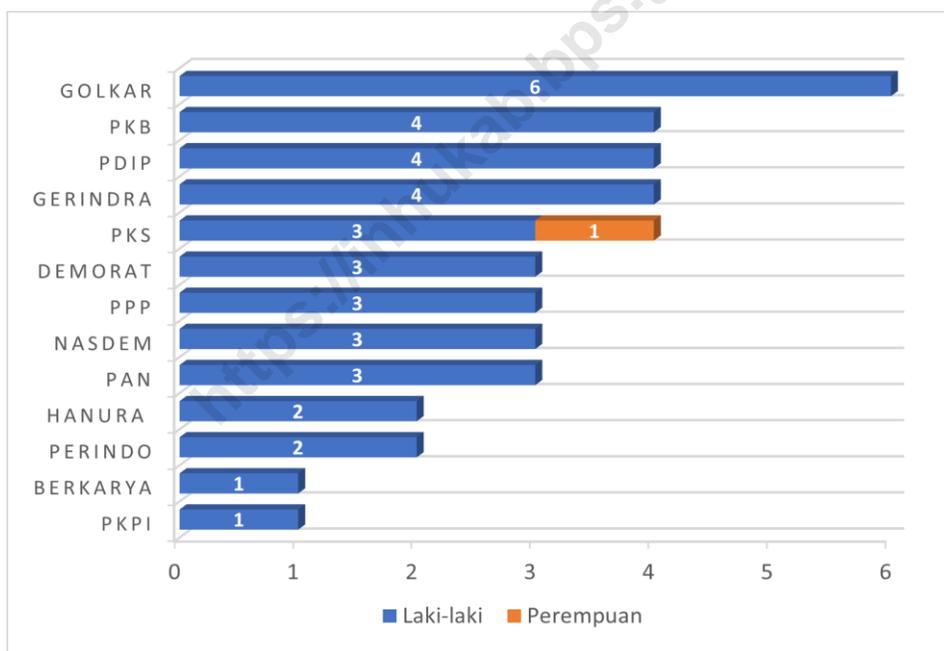


Gambar 2. Persentase anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa persentase anggota perempuan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 hanya sebesar 3 persen, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Indragiri Hulu masih di bawah persentase yang diharapkan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu pada pasal 58 dan 59 serta peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. Maka, untuk pemilu selanjutnya partai politik

harus memerhatikan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dapat memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

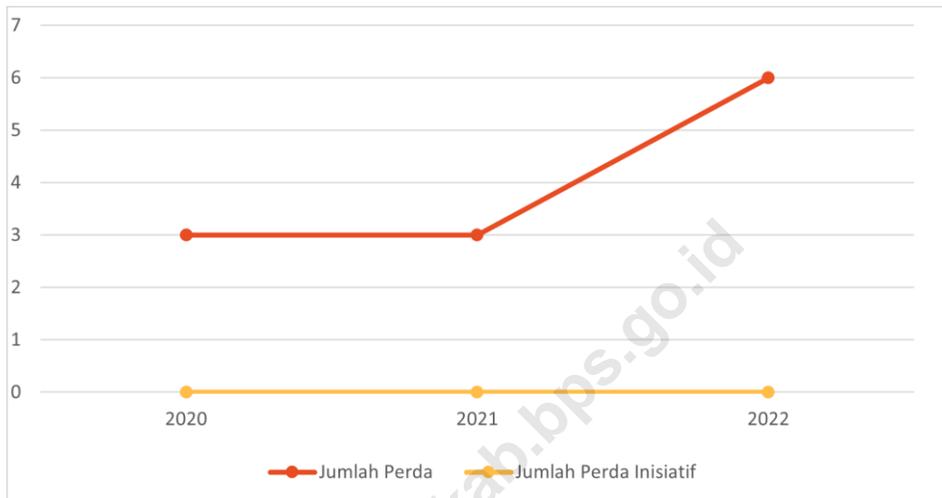
Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu merupakan wakil dari tiga belas partai politik. Partai Golkar menjadi partai dengan perwakilan terbanyak, yaitu sebanyak enam orang, kemudian diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya dan PDIP dengan masing-masing diwakili oleh empat orang. Sedangkan partai Berkarya dan PKPI menjadi partai dengan perwakilan paling sedikit, yaitu sebanyak satu orang. Gambar 3 menunjukkan jumlah anggota DPRD menurut asal partai politik dan jenis kelamin Tahun 2022.



Gambar 3. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Salah satu peran DPRD adalah menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Perda yang efektif dan efisien akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib daerah. Gambar 4, menunjukkan Perda dan

Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Jumlah Perda yang dihasilkan pada Tahun 2020 dan 2021 adalah sebanyak 3 Perda. Kemudian mengalami kenaikan menjadi 6 Perda pada Tahun 2022.



Gambar 4. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022

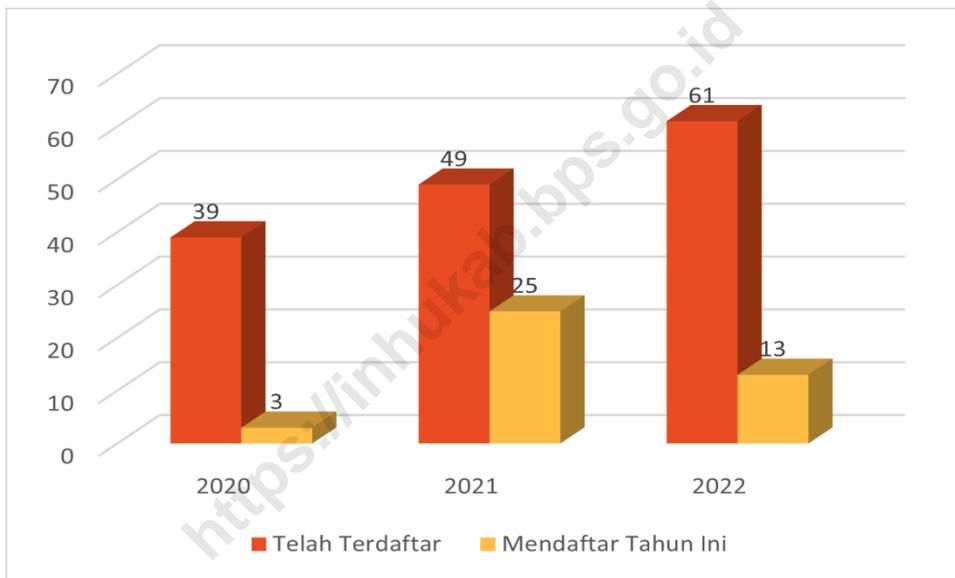
Dari sejumlah Perda yang dihasilkan, di dalamnya termasuk Perda Inisiatif, yaitu Perda yang dirancang berdasarkan inisiatif DPRD. Jumlah Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terus mengalami penurunan dan sejak Tahun 2019 sampai saat ini, Kabupaten Indragiri Hulu tidak lagi menghasilkan Perda Inisiatif. Perda Inisiatif terakhir kali dihasilkan pada Tahun 2017.

3.2.2 Organisasi Masyarakat/LSM

Berdasarkan data Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Indragiri Hulu yang di tunjukkan pada Gambar 5, memperlihatkan bahwa jumlah organisasi masyarakat/LSM yang terdaftar di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan peningkatan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022, jumlah organisasi masyarakat/LSM sebanyak 39 organisasi, kemudian meningkat

menjadi 49 organisasi pada Tahun 2021 dan menjadi 61 organisasi pada Tahun 2022.

Peningkat jumlah organisasi masyarakat/LSM pada Tahun 2022, berbanding lurus dengan kenaikan jumlah organisasi masyarakat/LSM dengan status baru mendaftar yang terus mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk membentuk organisasi masyarakat/LSM meningkat pada Tahun 2022.



Gambar 5. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022

Diperlukan sosialisasi oleh Bakesbangpol untuk meningkatkan aktifitas atau kegiatan organisasi masyarakat/LSM sehingga organisasi masyarakat tersebut dapat berjalan secara terus menerus sehingga masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, diperlukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat/LSM agar kegiatan organisasi bisa optimal, sehingga dapat lebih bermanfaat baik untuk anggota organisasi maupun untuk masyarakat sekitar.

4

KEAMANAN

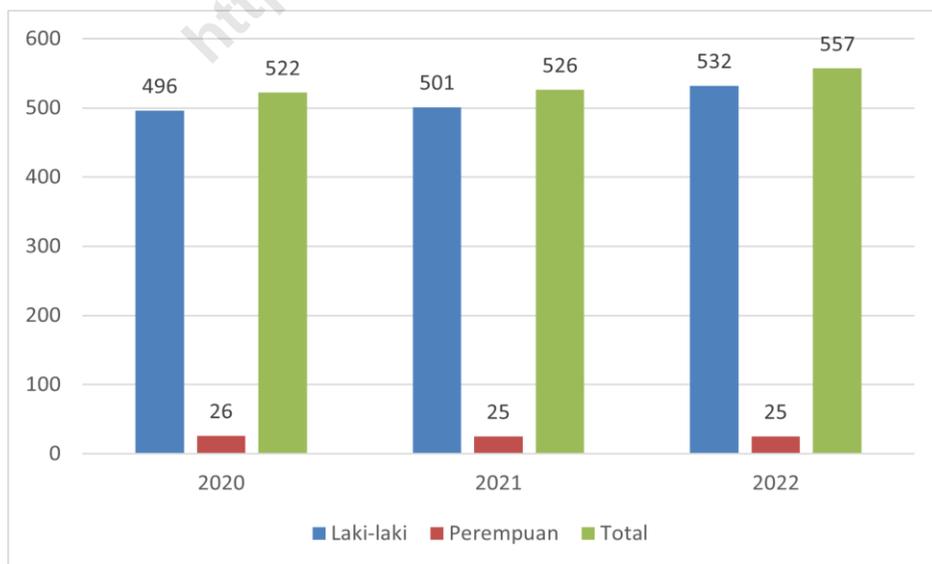


BAB IV KEAMANAN

4.1 SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN WILAYAH

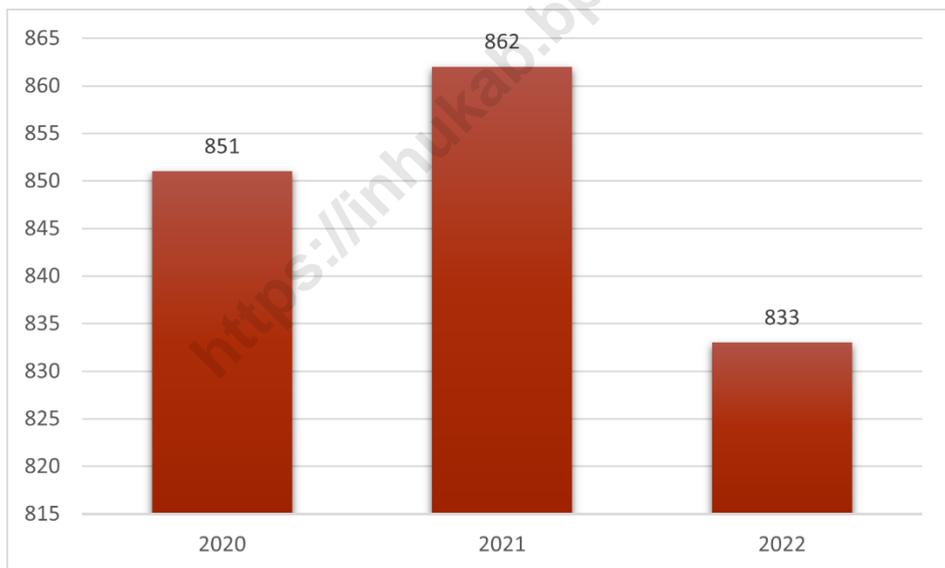
Ketersediaan fasilitas dan jumlah personel keamanan suatu wilayah akan memengaruhi kondisi keamanan di wilayah tersebut. Fasilitas keamanan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, diantaranya adalah Polres, Polsek, dan pos polisi. Jumlah Polres dan Polsek di Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengalami perubahan dari Tahun 2020-2022 yaitu satu Polres dan sepuluh Polsek. Namun di Tahun 2022, pos polisi menjadi subsektor dan tergabung dengan polsek sehingga strukturnya kini berada di bawah polres. Terdapat dua subsektor yang berada di Rakit Kulim dan Peranap.

Selain fasilitas keamanan, jumlah personel yang dimiliki suatu wilayah juga berperan penting dalam menjaga kondisi keamanan di wilayah tersebut. Gambar 6 menunjukkan jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022.



Gambar 6. Jumlah Personel Polisi Kabupaten Indragiri Hulu menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa jumlah personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2020 hingga Tahun 2022 mengalami peningkatan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu dari Tahun 2020-2022 selalu di dominasi oleh laki-laki. Tugas polisi sebagai pelayan masyarakat membuat rasio penduduk per polisi menjadi salah satu indikator yang penting untuk diketahui terutama dalam pengambilan keputusan penempatan personel polisi di suatu wilayah. Jika proporsinya tidak ideal, maka tugas polisi sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak optimal karena tidak semua masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik. Gambar 7 menunjukkan rasio penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022.

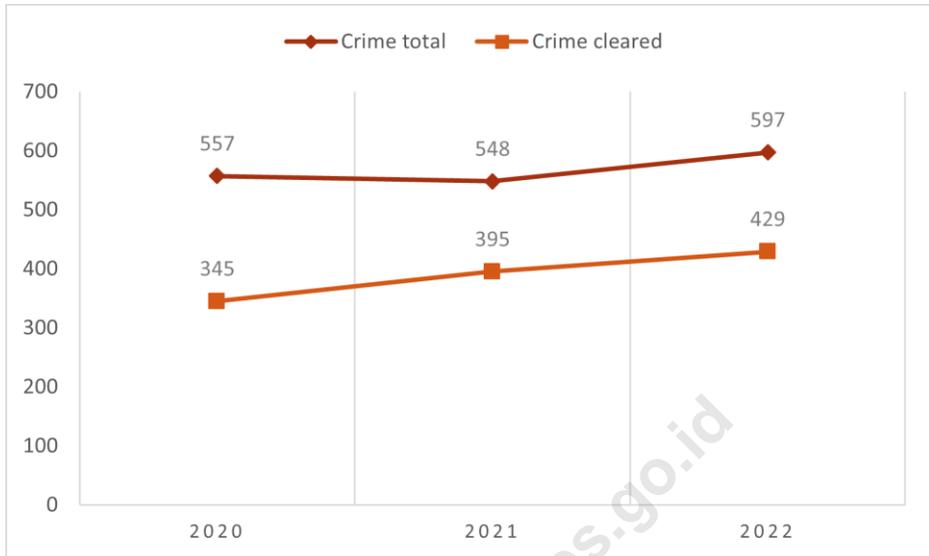


Gambar 7. Rasio Penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022

Berdasarkan Gambar 7, pada Tahun 2022 satu orang personel polisi harus melayani 833 penduduk. Rasio ini turun jika dibandingkan Tahun 2020 dan 2021. Menurut PBB, rasio ideal polisi terhadap penduduk adalah 1:400, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio penduduk per polisi di Kabupaten Indragiri Hulu belum ideal. Oleh karena itu perlu adanya tambahan personel polisi di Kabupaten Indragiri Hulu sekitar dua kali lipat dari jumlah polisi saat ini.

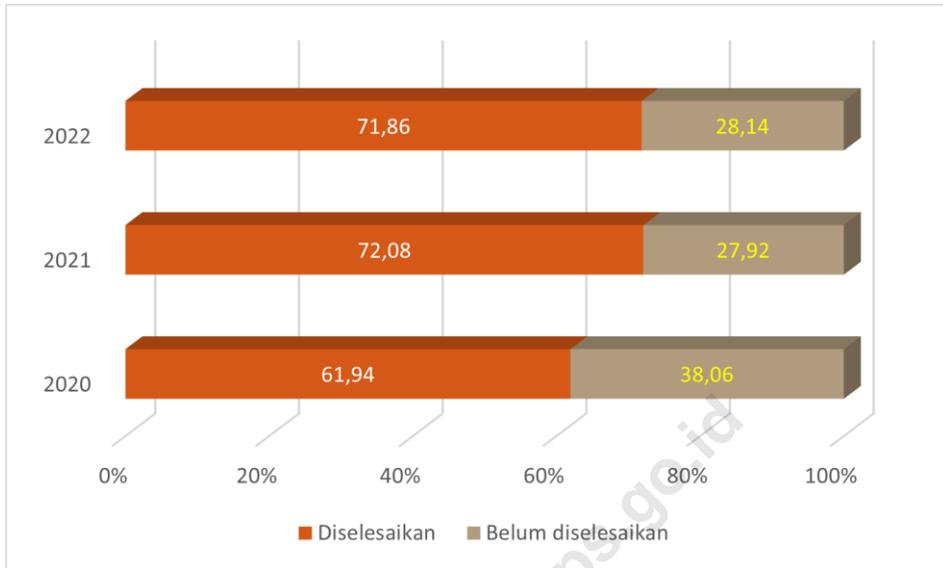
4.2 INDIKATOR UTAMA KEJAHATAN

Data dan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin masyarakat merasa tidak aman. Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian (*crime total*) Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2022 sebanyak 597 kasus, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak 548 kasus, dan Tahun 2020 sebanyak 557 kasus. Jika jumlah kejahatan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan di suatu wilayah, maka dari hasil pencatatan kepolisian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu menurun dari tahun 2020-2022. Namun untuk jumlah kasus kejahatan yang diselesaikan mengalami peningkatan. Jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*) dari 557 kasus yang dilaporkan Tahun 2020, sebanyak 345 kasus dapat diselesaikan. Kemudian dari 548 kasus yang dilaporkan pada Tahun 2021, sebanyak 395 kasus berhasil diselesaikan. Pada Tahun 2022, sebanyak 597 kasus yang dilaporkan terdapat 429 jumlah kasus yang diselesaikan. Gambar 8 menunjukkan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan Tahun 2020-2022. *Crime rate* adalah angka kejahatan per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2022, *crime rate* sebesar 131. Artinya, sebanyak 131 orang penduduk berisiko terkena kejahatan (per 100.000 penduduk).



Gambar 8. Jumlah kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) dan Kejahatan Diselesaikan (*Crime Cleared*) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022

Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat ke kepolisian pada Tahun 2020, sekitar 61,94 persen perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (*clearance rate*). Kemudian meningkat menjadi 72,08 persen di Tahun 2021 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 71,86 persen di Tahun 2022. Gambar 9 menunjukkan persentase perkara tindak pidana yang dilaporkan dan diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022.



Gambar 9. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2022

4.3 TINDAK KEJAHATAN MENURUT JENISNYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Berdasarkan data Kepolisian Kabupaten Indragiri Hulu, peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu secara umum sangat beragam, baik jenis maupun kuantitasnya. Banyaknya kasus kejahatan baik yang dilaporkan maupun yang diselesaikan di Tahun 2022 berdasarkan kelompok kejahatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Jika dilihat dari jenis kejahatannya, pada Tahun 2022 tiga jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian, narkoba psikotropika, dan penganiayaan ringan. Jumlah laporan pencurian dan pencurian dengan pemberatan sebanyak 103 dan 101 kasus. Dari 103 kasus pencurian yang dilaporkan, 76 kasus yang berhasil diselesaikan atau sekitar 73,79 persen. Kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 63 kasus yang berhasil diselesaikan atau 62,38 persen. Selanjutnya, untuk 79 jumlah laporan narkoba dan psikotropika, 100 persen semua kasus berhasil diselesaikan. Kemudian,

kejahatan penganiayaan ringan menempati peringkat ketiga dengan jumlah 60 kasus.

Hal yang harus diwaspadai selain dari jumlah kejahatan yang tinggi adalah kasus kejahatan yang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021. Kasus pencurian, pembunuhan, narkoba dan psikotropika mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022, kasus narkoba dan psikotropika melonjak dengan sangat tajam dari nol kasus pada Tahun 2021 menjadi 79 kasus walaupun seluruh kasus berhasil diselesaikan oleh kepolisian.

Selain jumlah kejahatan yang mengalami kenaikan, juga terdapat kejahatan yang mengalami penurunan di Tahun 2021. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat dan ringan. Pencurian kendaraan bermotor mengalami penurunan tertinggi, dari 57 kasus di Tahun 2021 menjadi 35 kasus di Tahun 2022.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu menurun dalam kurun waktu 2020-2022. Diharapkan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa bekerja sama demi menekan jumlah kejahatan di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga tercipta Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih aman. Pemerintah juga dapat lebih aktif dalam menghimpun informasi dari masyarakat terkait tindak kejahatan dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan tindak kejahatan sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih baik.

4.4 KORBAN KEJAHATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Selain jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Indragiri Hulu, Polres Kabupaten Indragiri Hulu juga mencatat jumlah korban kejahatan menurut kelompok dan jenis

kelamin. Informasi ini berguna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Tabel jumlah korban kejahatan menurut kelompok dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 2. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2022 jenis kejahatan dengan korban terbanyak adalah pencurian dengan jumlah korban sebanyak 103 orang terdiri dari 83 laki-laki dan 20 perempuan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebanyak 81 korban dengan 64 laki-laki dan 17 perempuan. Jenis kejahatan selanjutnya yang memiliki korban terbanyak kedua adalah pencurian dengan pemberatan dengan jumlah korban 103 orang yang terdiri dari 71 laki-laki dan 30 perempuan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebanyak 85 korban dengan 58 laki-laki dan 27 perempuan. Jenis kejahatan dengan korban ketiga terbanyak adalah penganiayaan ringan dengan jumlah korban 47 orang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah ini menurun jika dibandingkan Tahun 2021 dengan 68 korban terdiri dari 64 laki-laki dan 4 perempuan.

Selain jenis kejahatan dengan jumlah korban terbanyak, jenis kejahatan yang perlu untuk diperhatikan adalah kejahatan dengan jumlah korban perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini mengingat kejahatan terhadap perempuan menjadi perhatian berbagai pihak baik pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun swasta melalui berbagai LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu jenis kejahatan dengan korban perempuan terbanyak sebanyak 22 korban yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Perlu diberikan perhatian agar jumlah korban dapat ditekan untuk dimasa yang akan datang.

5

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilu legislatif Tahun 2022 sebanyak 40 orang yang berasal dari 13 partai politik. Dari jumlah tersebut, hanya 3 persen anggota yang berjenis kelamin perempuan.
2. Jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan oleh anggota DPRD Tahun 2022 berjumlah 6 Perda dengan tidak ada Perda Inisiatif yang dihasilkan.
3. Jumlah organisasi masyarakat/LSM yang terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 sebanyak 61 organisasi meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebanyak 49 organisasi.
4. Fasilitas keamanan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 terdiri dari 1 Polres, 10 Polsek, dan 2 subsektor.
5. Rasio penduduk per polisi Tahun 2022 sebesar 833, artinya satu orang personil polisi melayani 833 penduduk di Kabupten Indragiri Hulu.
6. Angka jumlah kejahatan (*crime total*) Tahun 2022 adalah sebanyak 597 kasus, dan sekitar 71,86 persen dapat diselesaikan (*clearance rate*).
7. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) Tahun 2022 sebesar 131, artinya sebanyak 131 orang penduduk berisiko terkena kejahatan.
8. Selama Tahun 2022 yang sering terjadi dan dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian, dan narkoba psikotropika.

Lampiran 1 Jumlah Kejadian Kejahatan (Lapor Dan Selesai) Tahun 2022
Appendix 1 Number of Crime Incidents (Reported and Completed) in 2022

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2022	
		LAPOR	SELESAI
1	2	3	4
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA			
1	PEMBUNUHAN	5	3
KEJAHATAN TERHADAP FISIK/BADAN			
2	PENGANIAYAAN RINGAN	60	47
3	PENGANIAYAAN BERAT	3	3
4	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	22	22
KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN			
5	PERKOSAAN	6	2
6	PENCABULAN	10	14
KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG			
7	PENCULIKAN	-	-
8	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR	-	-
KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG DENGAN PENGGUNAAN KEKERASAN			
9	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	5	8
10	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API (SENPI)	-	-
11	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (SAJAM)	-	-
KEJAHATAN TERHADAP MILIK/BARANG			
12	PENCURIAN	103	76
13	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	101	63
14	PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	35	9
15	PENGRUSAKAN/PENGHANCURAN BARANG	14	2
16	PEMBAKARAN DENGAN SENGAJA	-	-
17	PENADAHAN	1	8
KEJAHATAN TERKAIT NARKOTIKA			
18	NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	79	79
KEJAHATAN TERKAIT PENIPUAN, PENGELAPAN, DAN KORUPSI			
19	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	30	21
20	PENGELAPAN	53	27
21	KORUPSI	-	-
KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM			
22	TERHADAP KETERTIBAN UMUM	-	-

Lampiran 2 Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022
Appendix 2 Number of Victims Based on Gender in 2022

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	2022	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA			
1	PEMBUNUHAN	4	1
KEJAHATAN TERHADAP FISIK/BADAN			
2	PENGANIAYAAN RINGAN	47	47
3	PENGANIAYAAN BERAT	3	3
4	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	0	22
KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAN			
5	PERKOSAAN	0	2
6	PENCABULAN	0	14
KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG			
7	PENCULIKAN	-	-
8	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR	-	-
KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG DENGAN PENGGUNAAN KEKERASAN			
9	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	4	1
10	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API (SENPI)	-	-
11	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (SAJAM)	-	-
KEJAHATAN TERHADAP MILIK/BARANG			
12	PENCURIAN	83	20
13	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	71	30
14	PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	20	15
15	PENGRUSAKAN/PENGHANCURAN BARANG	12	2
16	PEMBAKARAN DENGAN SENGAJA	-	-
17	PENADAHAN	1	0
KEJAHATAN TERKAIT PENIPUAN, PENGELAPAN, DAN KORUPSI			
19	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	20	19
20	PENGELAPAN	32	21

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Data Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Jl. Batu Canai Pematang Reba 29315
Telepon/Fax: (0769) 341285
Homepage: <http://inhukab.bps.go.id>
Email: bps1402@bps.go.id